

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam rangka terwujudnya keseimbangan hak daerah antara pendapatan daerah dan kewajiban daerah dalam urusan pemerintahan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terdapat Informasi keuangan daerah yang diperlukan dalam proses pengendalian, perencanaan, serta pengambilan kebijakan desentralisasi fiskal yang dituangkan pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di setiap tahunnya. LKPD mempunyai peranan penting dalam mendukung kegiatan manajemen keuangan pemerintahan daerah (Juliyanti, 2023). Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPD dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai media untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. setiap tahun laporan keuangan dari pemerintah daerah diperiksa dan mendapat opini atas pemeriksaan tersebut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). LKPD dianggap berkualitas jika setiap tahun memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Ini berarti penyajian dan pengungkapan laporan keuangan entitas pemerintah daerah tersebut dengan wajar serta memenuhi standar kualitas (Vidyasari & Suryono, 2021). SKPD sebagai entitas akuntansi mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan yang berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kesemua laporan tersebut disusun dan disajikan sesuai berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).

Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam penyampaian informasi. Sistem ini berfungsi sebagai sarana pendukung untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Diharapkan, sistem akuntansi ini mampu memperbaiki pencatatan dan pelaporan keuangan ke arah yang lebih baik (Samiun, Muhammad, Hasnim, 2019). Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah didalamnya terdapat banyak peran dan unsur yang saling berhubungan salah satunya sistem yang digunakan sebagai dasar menyajikan laporan keuangan, sistem yang dipakai bisa menggunakan aplikasi dan atau manual. Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 telah mengalami beberapa perubahan sistem yang dipakai dikarenakan terdapat perubahan kebijakan dan perkembangan teknologi informasi. Dalam penyusunan laporan keuangan meskipun menggunakan sistem akan tetapi di butuhkan kertas kerja atau data lain sebagai pembanding agar laporan keuangan di sajikan secara handal dan akuntabel.

Pada Tahun 2018 penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung menggunakan model aplikasi berbasis desktop dan

terdapat kekurangan diantaranya aplikasi dan databasenya yang terpisah-pisah sehingga proses konsolidasinya tidak bisa dilakukan secara otomatis.

Pada Tahun 2019-2020 penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung menggunakan model aplikasi berbasis web, dengan metode ini secara sistem lebih stabil dan lebih mudah dalam mengakses maupun untuk mengkonsolidasikan datanya.

Pada Tahun 2021-2023 penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah di Seluruh Indonesia diwajibkan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dari Kementerian Dalam Negeri. Kabupaten Temanggung untuk penyusunan Laporan Keuangan tahun 2021-2023 belum menggunakan SIPD Penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Temanggung belum menggunakan SIPD khususnya untuk modul Penatausahaan dan modul Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah karena terdapat beberapa pertimbangan serta kebijakan diantaranya implementasi sistem tersebut belum berjalan dengan optimal serta terdapat beberapa kendala dalam aplikasi SIPD ini diantaranya karena aplikasi ini digunakan secara bersamaan oleh seluruh pemerintah daerah di Republik Indonesia sehingga mengakibatkan akses/ konektivitas aplikasi menjadi lambat dan akan kembali lancar ketika diluar jam kerja normal. Selain itu juga kesiapan dari sumber daya manusia juga menjadi tantangan tersendiri, diperlukan pembelajaran kepada semua Perangkat Daerah, sering kali jika menemui kendala harus dilakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri salah satunya dengan menghubungi *helpdesk* sesuai masing-masing wilayah.

Sesuai surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia nomor B/5629/GAH.00/10-11/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024 perihal Percepatan Penggunaan Modul Penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan pada Aplikasi SIPD RI di Pemerintah Daerah, Kabupaten Temanggung termasuk salah satu dari 179 pemerintah daerah yang belum menerapkan SIPD Penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan Keuangan, dalam surat tersebut ditegaskan bahwa salah satu target pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi adalah penggunaan seluruh modul SIPD RI (Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, serta akuntansi pelaporan) mencapai 100% di akhir tahun 2024, juga disampaikan agar masing-masing Pimpinan Daerah mempercepat penggunaan modul penatausahaan maupun akuntansi pelaporan paling lambat hingga akhir November 2024.

Sesuai surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 600.5.4/4429/SJ tanggal 11 September 2024 perihal Implementasi SIPD, Kabupaten Temanggung termasuk salah satu dari 159 pemerintah daerah yang belum menerapkan modul penatausahaan dan pelaporan, disampaikan dalam surat tersebut bagi pemerintah daerah yang belum secara menyeluruh mengimplementasikan Aplikasi SIPD RI khususnya modul penatausahaan dan pelaporan paling lambat November 2024 pemerintah daerah diwajibkan

menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta akuntansi dan pelaporan secara penuh dengan menggunakan Aplikasi SIPD RI.

Berdasarkan hal diatas Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk penyusunan laporan keuangan Tahun 2024 akan menggunakan SIPD, berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Temanggung mempunyai kewajiban sekaligus tantangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan aplikasi SIPD sehingga dibutuhkan strategi-strategi khusus agar implementasi dalam menggunakan SIPD untuk menyusun laporan keuangan dapat berjalan secara optimal. Proses dan sistem yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Temanggung setiap tahunnya tidak bisa dipastikan konsistensinya dikarenakan terdapat banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya diantaranya karena terdapat perubahan kebijakan, oleh karena itu dibutuhkan strategi-strategi khusus di setiap tahunnya dalam penyusunan laporan keuangan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang terdapat di Kabupaten Temanggung yaitu termasuk Pemerintah Daerah yang belum menggunakan SIPD modul Penatausahaan serta modul Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Tahun 2021-2023. Dengan komitmen pada Tahun 2024 akan mengimplementasikan SIPD dalam menyusun laporan keuangan maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah strategi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dengan pertanyaan dalam penelitian (i) apakah yang harus di persiapkan dalam penyusunan LKPD Kabupaten Temanggung dengan menggunakan SIPD (ii), apakah kendala-kendala yang dihadapi waktu penyusunan LKPD Kabupaten Temanggung dengan menggunakan SIPD, (iii) apakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala saat menyusun LKPD Kabupaten Temanggung dengan menggunakan SIPD, dan (iv) apakah SIPD dapat digunakan secara optimal untuk menyusun LKPD Kabupaten Temanggung.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan (i) untuk mengetahui yang harus di persiapkan dalam penyusunan LKPD menggunakan SIPD, (ii) untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penyusunan LKPD menggunakan SIPD, (iii) untuk mengetahui strategi yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala penyusunan LKPD Kabupaten Temanggung, dan (iv) untuk mengetahui apakah SIPD dapat digunakan secara optimal dalam penyusunan LKPD Kabupaten Temanggung.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis penelitian ini yaitu (i) memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, (ii) memberikan tambahan kontribusi informasi kepada peneliti di dalam proses penyusunan LKPD. Adapun untuk manfaat praktis

penelitian ini yaitu untuk memberikan tambahan kontribusi informasi kepada para penyusun LKPD dengan menggunakan SIPD.

2. Kajian Pustaka

2.1. Grand Theory

Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah *stewardship theory* (Donaldson dan Davis dalam Anasta Lawe & Ambarwati Vidia, 2023) Menggambarkan kondisi di mana manajemen tidak dipandu oleh tujuan pribadi, melainkan lebih fokus pada pencapaian hasil utama yang menguntungkan organisasi. Dengan demikian, teori ini didasarkan pada prinsip sosiologi dan psikologi yang dirancang, di mana para eksekutif sebagai pengelola (*steward*) yang termotivasi bertindak sesuai kepentingan dan keinginan *principal*.

Keterkaitan dengan penelitian ini terlihat dari sisi pelaporan keuangan pemerintah daerah dimana dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Temanggung bertindak sebagai pihak *steward* yang memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang harus disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Hal tersebut kemudian dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2.2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan adalah catatan informasi mengenai suatu entitas dalam suatu periode akuntansi yang bertujuan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan ini disusun secara terstruktur untuk menunjukkan posisi keuangan serta terdiri dari transaksi yang dilaksanakan oleh entitas pelaporan. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi tentang posisi keuangan yang diantaranya terdiri dari realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan entitas pelaporan, yang dapat berguna bagi pengguna dalam membuat serta mengevaluasi keputusan terkait alokasi sumber daya (Anasta Lawe & Ambarwati Vidia, 2023). Sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas dan dasar pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh pihak eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu disertai dengan pengungkapan informasi. Pengungkapan ini terbagi menjadi dua jenis: *Voluntary Disclosure* (pengungkapan sukarela) dan *Mandatory Disclosure* yang merupakan pengungkapan wajib sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengungkapan wajib ini menjadi salah satu bagian dari Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas serta transparansi keuangan publik (Juliyanti, 2023). (Suryanto, 2017) menegaskan bahwa pengungkapan informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah berguna bagi para pemangku kepentingan untuk penilaian tingkat akuntabilitas yang dimiliki.

2.3. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut (Suwanda; Dadang; Rosemary, 2020) Proses penyusunan LKPD melibatkan pengumpulan data transaksi keuangan dari seluruh unit kerja pemerintah daerah, pengolahan data akuntansi menggunakan sistem informasi

keuangan daerah, penyusunan laporan keuangan konsolidasi untuk menyatukan laporan dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Tantangan dalam menyusun laporan keuangan yaitu keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, penerapan teknologi informasi yang belum merata, kompleksitas penerapan basis akrual.

2.4. Strategi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam penyusunan laporan keuangan menurut (Suwanda; Dadang; Rosemary, 2020) pentingnya beberapa strategi kunci dalam penyusunan LKPD, diantaranya:

- Kepatuhan terhadap SAP berbasis akrual Pemerintah daerah harus memastikan bahwa semua transaksi keuangan dicatat sesuai dengan prinsip akuntansi akrual untuk meningkatkan transparansi.
- Penggunaan teknologi direkomendasikan untuk membantu integrasi data antar-OPD, sehingga dapat mempercepat proses penyusunan laporan.
- Peningkatan Kompetensi SDM melalui pelatihan teknis, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas staf akuntansi agar lebih mahir dalam menyusun laporan berbasis akrual.

2.5. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di jelaskan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi terkait pembangunan daerah, keuangan daerah, serta Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung bermanfaat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, juga dijelaskan dalam pasal terkait Informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dihasilkan dari tahapan akuntansi dan laporan keuangan daerah berbasis elektronik disajikan secara bulanan, semesteran dan tahunan. Tahapan akuntansi dan laporan keuangan daerah meliputi (i) laporan realisasi anggaran, (ii) laporan perubahan saldo anggaran lebih, (iii) laporan operasional, (iv) laporan perubahan ekuitas, (v) neraca, (vi) laporan arus kas, dan (vii) catatan atas laporan keuangan.

2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan laporan keuangan dalam pemerintah daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Hasil Penelitian sebelumnya berbeda-beda sesuai kondisi pemerintah daerah masing-masing. Penelitian terdahulu menjadi bahan masukan untuk menyempurnakan penelitian ini.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya terdapat beberapa yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu terkait implementasi penggunaan SIPD sebagai sistem dalam menyusun laporan keuangan di pemerintah daerah. Beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah faktor kendala-kendala yang dialami serta lokasi penelitian dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Penelitian terdahulu terkait penyusunan laporan keuangan di pemerintah daerah dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Variabel	Hasil
1.	Herindraningrum & Yuhertiana, (2021)	pengaruh kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia antara lain : Kompetensi sumber daya manusia, Teknologi Informasi, Akuntabilitas, Transparansi, Kualitas Audit, Sistem Akuntansi, Prosedur Akuntansi, Standar Akuntansi, dan Pengendalian Internal.
2.	Rosana & Bharata, (2023)	kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah	Penelitian ini memberikan kesimpulan subjektif mengenai implementasi SAP berbasis akrual pada laporan keuangan dari peneliti terdahulu, yang membuktikan bahwa SAP mempengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah. Tetapi untuk penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 mengenai SAP berbasis akrual belum sepenuhnya diterapkan dalam proses penyajian laporan keuangan, baik itu di pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat.
3.	Susanti et al., (2023)	penerapan SIPD terhadap kemudahan penyusunan laporan keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh penerapan SIPD terhadap penyusunan laporan keuangan SKPD Kota Cimahi yang sangat signifikan yaitu sebesar 0,885 atau 88,5% yang menunjukkan bahwa penerapan SIPD mempengaruhi kemudahan penyusunan laporan keuangan SKPD Kota Cimahi dan sisanya 11.5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.
4.	Juliyanti, (2023)	Akuntabilitas Publik Pengungkapan Wajib LKPD	Melalui hasil analisis regresi sederhana, Pengungkapan LKPD memiliki pengaruh secara langsung yang signifikan terhadap Akuntabilitas Publik. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan beberapa studi empiris yang membuktikan bahwa <i>disclosure</i> atas laporan keuangan mengurangi ketidakseimbangan informasi antara pihak <i>agent</i> dan <i>principal</i> melalui publikasi laporan keuangan yang mengungkap informasi.

3. Metode Penelitian

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif dalam bentuk studi kasus, di mana objek penelitian mencakup hal-hal yang berkaitan dengan strategi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah

daerah di Kabupaten Temanggung khususnya menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Dalam hal ini, peneliti berperan sebagai instrumen sekaligus pengumpul data, dengan fungsi mendukung pelaksanaan penelitian sebagai instrumen utama. Dengan demikian, kehadiran peneliti dikenali oleh subjek atau informan sebagai seorang peneliti untuk mengetahui fenomena yang terjadi sesuai dengan objek yang diteliti. Dijelaskan (Denzin & Lincoln dalam Anggito & Setiawan, 2018) menyatakan terkait dengan Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam lingkungan alami dengan tujuan penafsiran fenomena, menggunakan berbagai metode yang tersedia. (Erickson dalam Anggito & Setiawan, 2018) juga menyatakan bahwa Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berlangsung dalam konteks alami dengan tujuan memahami dan mengartikan fenomena yang terjadi, serta melibatkan beragam metode yang dapat digunakan.

Kegiatan utama dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan secara mendalam dan terperinci strategi serta fenomena yang diteliti, khususnya mengenai masalah-masalah yang berkaitan dalam menyusun laporan keuangan di pemerintah daerah dengan menggunakan SIPD. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara secara mendalam hal ini sesuai dengan pandangan yang menyatakan bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang diamati.

Penelitian kualitatif didasarkan pada filsafat postpositivisme, karena digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alami, peneliti berperan sebagai instrumen utama. Sampel sumber data dilakukan dengan cara purposif dan dengan metode *snowball*. Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi (penggabungan beberapa metode), analisis data yang bersifat induktif atau kualitatif, serta hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pemahaman makna daripada menghasilkan generalisasi (Sugiyono, 2019). Metode penelitian kualitatif disebut metode baru karena popularitasnya yang relatif baru meningkat. Metode ini juga disebut postpositivistik sebab berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini juga dikenal sebagai metode artistik karena dalam proses penelitiannya lebih menyerupai seni dan kurang terstruktur, serta disebut sebagai metode interpretif karena hasil penelitiannya berfokus pada interpretasi data yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2019).

Menurut (Sugiyono, 2019) ciri-ciri penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

- Pendekatan induktif data dikumpulkan terlebih dahulu untuk membangun teori atau pola tertentu.
- Desain Fleksibel: Penelitian dapat disesuaikan selama proses berlangsung.
- Data Kualitatif: Berupa kata-kata, deskripsi, atau narasi, bukan angka.
- Holistik: Mempertimbangkan konteks dan latar belakang secara menyeluruh.

Sedangkan untuk langkah-langkah penelitian kualitatif yang perlu dilakukan antara lain:

- Merumuskan masalah penelitian mengidentifikasi isu yang akan diteliti.
- Tinjauan literature memahami teori atau penelitian terkait sebelumnya.

- Pengumpulan data menggunakan metode seperti wawancara mendalam atau observasi.
- Analisis data dilakukan dengan mendalam untuk menemukan tema atau pola.
- Penyusunan laporan menyampaikan hasil penelitian dengan narasi yang jelas dan terstruktur.

Dengan pendapat-pendapat diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menerjemahkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, sampel sumber data diambil dan dilakukan secara *purposive* serta *snowball*, dengan teknik pengumpulan triangulasi (gabungan), analisis data yang bersifat induktif/kualitatif, dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan kepada makna yang didapat dari pada generalisasi. Dengan jenis penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan menjawab tantangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dalam menyusun laporan keuangan menggunakan aplikasi SIPD.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, khususnya di Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Temanggung yang berlokasi di Jl. Pahlawan No. 94 Temanggung. Dipilihnya lokasi tersebut karena sumber data primer dan sekunder yang berkaitan dengan proses penyusunan laporan keuangan di pemerintah daerah Kabupaten Temanggung terdapat dalam Perangkat Daerah tersebut.

Waktu penelitian dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Desember 2024 sampai bulan Februari 2025. Sedangkan pengumpulan data dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data dari hasil wawancara langsung yang dilakukan kepada informan/ narasumber yaitu akademisi dan pejabat struktural di lingkungan BPKPAD Kabupaten Temanggung.

3.3. Sumber Data/ Objek Penelitian

Sumber data primer lebih banyak melalui wawancara, pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan menggunakan pertanyaan kepada narasumber yang berkompeten yang berkaitan dengan penelitian ini agar mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat. Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan kepada akademisi Universitas BPD dan pejabat struktural di lingkungan Badan Pengelolan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung, yaitu (1) Kepala BPKPAD, (2) Kepala Bidang Penganggaran, (3) Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian, (4) Kepala Bidang Perbendaharaan, (5) Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan (6) Kepala Sub Bidang Akuntanasi.

Sumber data sekunder sebagai pendukung diperoleh melalui bukti data dukung dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Peneliti mengumpulkan bukti data dukung dan dokumen-dokumen terdahulu yang relevan dengan penelitian, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya

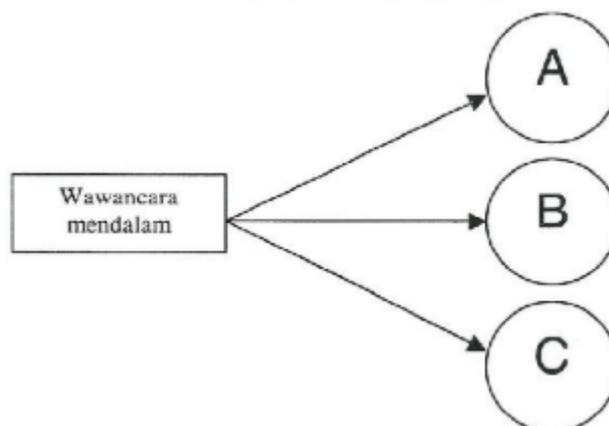
dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021-2023, dokumentasi sistem yang digunakan untuk menyusun LKPD Tahun 2018-2023.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dalam penelitian kualitatif sangat berperan dalam proses pengumpulan data yang akan menjadi instrumen dalam penelitian kualitatif. Menurut pendapat dari (Miles dalam Anggito & Setiawan, 2018) peneliti hadir di lapangan dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang sangat penting, karena peneliti berperan sebagai pengumpul data dan juga sebagai instrumen penelitian. Keuntungan dari peneliti yang hadir di lapangan sebagai instrumen adalah subjek penelitian menjadi lebih responsif terhadap keberadaan peneliti, dan peneliti juga dapat menyesuaikan diri dengan konteks penelitian. Keputusan yang berkaitan dengan penelitian dapat diambil dengan cepat dan tepat, serta informasi dapat diperoleh melalui sikap dan cara informan dalam memberikan data.

Pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh data tersebut dengan menggunakan metode wawancara kepada narasumber yang berkompeten sesuai bidangnya. Menurut (Sugiyono, 2019) wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui komunikasi langsung antara peneliti dan informan dengan tujuan memperoleh data yang mendalam. Wawancara dapat digunakan sebagai teknik dalam pengumpulan data ketika peneliti akan melakukan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi permasalahan yang perlu diteliti, serta ketika peneliti ingin menggali informasi yang lebih mendalam dari responden. Teknik pengumpulan data ini didasarkan pada laporan diri atau *self-report*, setidaknya pada keyakinan pribadi dan pengetahuan responden.

Dalam pengumpulan data, triangulasi merupakan teknik yang menggabungkan berbagai metode serta sumber data yang tersedia. Ketika peneliti menggunakan triangulasi dalam pengumpulan data, mereka tidak hanya mengumpulkan data tetapi juga menguji kredibilitasnya, yaitu dengan memverifikasi data menggunakan beragam teknik serta sumber data yang berbeda (Sugiyono, 2019) Dengan triangulasi diharapkan akan meningkatkan kekuatan data jika dibandingkan dengan satu pendekatan saja.



Gambar 1

Triangulasi "sumber" pengumpulan data. (satu teknik pengumpulan data pada bermacam-macam sumber data A,B,C)

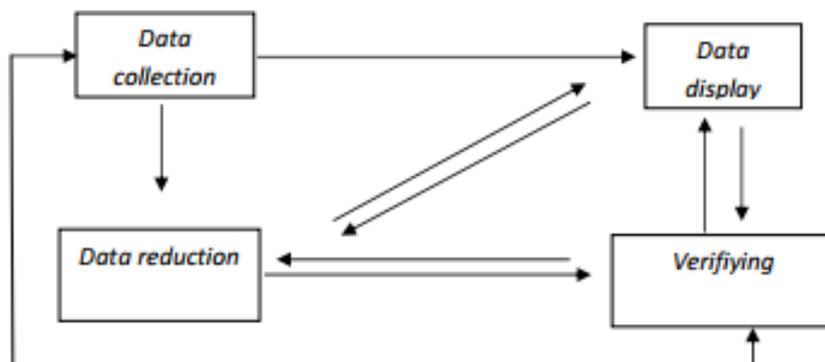
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik komunikasi langsung/ wawancara dengan menggunakan sejumlah pertanyaan melalui lisan. Wawancara ini dilakukan dengan bertatap langsung dengan sumber informasi yaitu pejabat struktural di lingkungan BPKPAD Kabupaten Temanggung. Hal ini dilakukan memperoleh informasi mengenai strategi dan proses dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan SIPD.
2. Teknik studi dokumenter yaitu cara pengumpulan data berupa dokumentasi foto pada waktu melaksanakan kegiatan wawancara serta dokumentasi dalam proses menyusun laporan keuangan di pemerintah daerah dengan menggunakan SIPD. Hasil dari rekaman wawancara yang berbentuk file suara dikonversi menjadi narasi berupa teks yang akan menjadi dokumen data dukung penelitian ini.

3.5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yang beragam (triangulasi), dan proses ini dilakukan secara berkelanjutan hingga mencapai kejenuhan data. Pengamatan yang terus menerus menghasilkan variasi data yang sangat tinggi. Data yang diperoleh bersifat kualitatif (meskipun tidak menutup kemungkinan adanya data kuantitatif), sehingga teknik analisis data yang digunakan belum memiliki pola yang jelas (Sugiyono, 2019). Analisis data merupakan proses dalam mencari dan menyusun data yang didapat dari wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi secara sistematis. Proses ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam suatu kategori, merinci data menjadi unit-unit yang dilakukan sintesis serta menyusun data dalam pola guna memilih informasi yang penting untuk dipelajari, dan menarik kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti sendiri maupun oleh orang lain (Zuchri, 2021).

Menurut Miles dan Huberman, analisis data meliputi tiga rangkaian kegiatan yang berlangsung secara bersamaan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Siklus dari proses analisis data ini digambarkan melalui skema berikut. Proses siklus data dijelaskan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 2
Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif
(Miles dan Huberman, 2007)

Jika hipotesis dapat diterima, maka analisis data berkembang dan mencakup tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersama, yaitu reduksi data, pengumpulan data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi. Siklus keseluruhan proses analisis data ini oleh Miles dan Huberman digambarkan dalam skema berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasi data "mentah" yang diperoleh dari catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung secara berkesinambungan selama penelitian di lapangan. Selama pengumpulan data, reduksi dilakukan melalui tahapan-tahapan seperti membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat pembagian wilayah (rayon), partisi, dan menulis memo. Proses reduksi data ini berlanjut hingga penelitian lapangan selesai dan laporan akhir tersusun lengkap.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah penyusunan rangkaian kalimat secara logis dan sistematis agar mudah dipahami. Mengingat keterbatasan manusia dalam menghadapi catatan lapangan bisa mencapai ribuan halaman dan berpotensi bias, maka diperlukan penyajian data yang jelas serta sistematis untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dalam konteks ini, penyajian data mencakup penyampaian faktor-faktor yang berkaitan dengan strategi untuk menyusun laporan keuangan di pemerintah daerah Kabupaten Temanggung SIPD.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Dalam penelitian kualitatif dapat ditarik kesimpulan berupa temuan baru yang sebelumnya belum diketahui. Temuan tersebut berupa gambaran tentang suatu objek yang sebelumnya belum jelas atau masih samar, sehingga setelah dilakukan penelitian, objek tersebut menjadi lebih terang dan dipahami dengan baik.

Berdasarkan hal di atas dapat dijelaskan, teknik analisis data ini merupakan bagian dari mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari pengamatan melalui wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi yang diolah dengan menggunakan aplikasi NVivo Pro 12 dan pada akhirnya dibuat kesimpulan sehingga dapat secara mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

3.6. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dari segala aspek. Dalam penelitian ini, keabsahan data mencakup uji validitas internal (*credibility*), validitas eksternal (*transferability*), reliabilitas (*dependability*), dan obyektivitas (*confirmability*). Hal ini sejalan dengan pendapat (Sugiyono, 2019) yang menyatakan bahwa uji keabsahan dari data dalam penelitian kualitatif mencakup empat komponen tersebut, yaitu validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas, dan obyektivitas.

Teknik keabsahan data di penelitian ini menggunakan uji triangulasi teknik. Triangulasi adalah metode pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sumber atau hal lain di luar data untuk proses pengecekan atau sebagai

pembandingan. Uji triangulasi ini bertujuan untuk menguji kredibilitas data dengan memeriksa data yang telah dikumpulkan melalui berbagai sumber. Triangulasi sumber digunakan oleh peneliti sebagai bahan verifikasi data yang diperoleh dari informan yang berkaitan dengan strategi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Temanggung dengan menggunakan SIPD, dengan cara memeriksa data dari sumber yang sama namun menggunakan teknik yang berbeda. Selain itu, triangulasi teknik diterapkan dengan membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dengan hasil observasi dan dokumentasi. Ketiga teknik ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat mengenai proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Temanggung dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).